
ARTIKEL

*STRATEGI KOLABORATIF PERIZINAN INFRASTRUKTUR PT TELKOM AKSES DAN
PEMERINTAH DAERAH DI KAMPUNG BATU LUBANG DISTRIK MAKBON KABUPATEN
SORONG*

Agil Saeni¹, Siti Nurjannah², Irnawati Jafar¹.

¹²³Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Korespondensi : irnawati102004@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi merupakan salah satu upaya untuk mendukung pemerataan akses informasi dan percepatan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan tersebut memerlukan strategi kolaboratif antara PT Telkom Akses dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam proses perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kolaboratif, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas kerja sama pada proses perizinan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Distrik Makbon Kabupaten Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara PT Telkom Akses dan Pemerintah Daerah telah berjalan melalui koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dalam proses perizinan. Namun, masih terdapat kendala berupa lamanya proses administrasi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat pembangunan jaringan telekomunikasi, serta persoalan penggunaan lahan dan hak ulayat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, komunikasi dengan masyarakat, serta penyempurnaan administrasi perizinan agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Strategi Kolaboratif, PT Telkom Akses, Pemerintah Daerah, Perizinan, Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi.

Abstract

The development of telecommunications network infrastructure is one of the efforts to support equitable access to information and accelerate regional development. The success of this development requires a collaborative strategy between PT Telkom Akses and the local government, particularly in the licensing process. This study aims to analyze the collaborative strategy, identify the obstacles encountered, and examine the efforts made to improve the effectiveness of cooperation in the licensing process for telecommunications network infrastructure development in Makbon District, Sorong Regency. This research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the collaboration between PT Telkom Akses and the local government has been implemented through coordination, communication, and cooperation in the licensing process. However, several obstacles remain, including lengthy administrative procedures, limited public understanding of the benefits of telecommunications network development, and issues related to land use and customary land rights. Therefore, improving

inter-agency coordination, strengthening communication with the community, and enhancing licensing administration are essential to ensure that telecommunications infrastructure development is carried out effectively, sustainably, and in accordance with applicable regulations.

Keywords : Collaborative Strategy, PT Telkom Akses, Local Government, Licensing, Telecommunications Network Infrastructure.

PENDAHULUAN

Meningkatnya cakupan dan kepadatan infrastruktur jaringan telekomunikasi terutama didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur telekomunikasi digunakan tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga berperan sebagai pilar penting dalam mendukung pelayanan publik, aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pembangunan regional yang seimbang. Infrastruktur telekomunikasi menjadi bagian penting dalam transformasi digital karena mampu meningkatkan akses informasi, memperkuat konektivitas masyarakat, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Kamaluddin et al. (2025), digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendorong pengembangan potensi ekonomi masyarakat melalui tersedianya akses informasi yang lebih luas.

PT Telkom Akses sebagai badan usaha yang bergerak dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jaringan telekomunikasi memegang peran penting dalam mendukung perluasan implementasi jaringan di berbagai wilayah. Namun, pembangunan infrastruktur tidak pernah dapat dilaksanakan secara mandiri karena setiap kegiatan pembangunan harus melalui proses perizinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berada pada posisi strategis sebagai pihak yang berwenang memberikan rekomendasi serta memastikan pembangunan berlangsung sesuai dengan perencanaan tata ruang, aspek lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Menurut Manulang (2021), Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik, sedangkan Shinta Ferlita (2024) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berperan dalam merumuskan perencanaan pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, PT Telkom Akses dituntut untuk membangun koordinasi dan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Daerah dalam setiap tahapan proses perizinan pembangunan.

Di Distrik Makbon Kabupaten Sorong, proses perizinan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi masih menghadapi berbagai kendala. Proses administrasi yang memerlukan waktu cukup lama, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat pembangunan jaringan telekomunikasi, serta persoalan penggunaan lahan dan hak ulayat sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antar pemangku kepentingan. Menurut Agranoff dan McGuire (2003), kolaborasi dalam sektor publik merupakan strategi penting untuk mengintegrasikan sumber daya, pengetahuan, dan kewenangan dari berbagai organisasi sehingga permasalahan publik yang kompleks dapat diselesaikan secara lebih efektif dibandingkan melalui kerja satu institusi saja, adapun Menurut Ansell dan Gash (2008), keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh adanya kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, pembangunan kepercayaan, dan proses kolaborasi yang melibatkan seluruh aktor secara aktif. Sementara itu, Emerson et al. (2012) menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan proses tata kelola yang mengintegrasikan kapasitas berbagai aktor untuk menghasilkan tindakan kolektif yang lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan publik. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Distrik Makbon

memerlukan strategi kolaboratif yang mampu memperkuat koordinasi antara PT Telkom Akses, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Selain itu, Sorensen dan Torfing (2016) menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi antarlembaga sangat dipengaruhi oleh kemampuan para aktor untuk membangun jaringan kerja (network governance), menyelaraskan kepentingan, serta menciptakan proses pengambilan keputusan yang partisipatif. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi tidak hanya memerlukan koordinasi administratif, tetapi juga sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi kolaboratif antara PT Telkom Akses dan Pemerintah Daerah dalam proses perizinan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Distrik Makbon Kabupaten Sorong. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta mengkaji upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi sehingga proses pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis strategi kolaboratif antara PT Telkom Akses dan Pemerintah Daerah dalam proses perizinan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi objek yang alami dan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam menghimpun dan menafsirkan data. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian dipilih karena merupakan wilayah yang menjadi lokasi pembangunan jaringan telekomunikasi dan memerlukan koordinasi intensif antara perusahaan dan pemerintah daerah. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri atas pihak Distrik Makbon, Kepala Kampung, Manager dan Korlap Konstruksi PT Telkom Akses, serta masyarakat yang terdampak oleh pembangunan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan validitas temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN

A. Strategi Kolaboratif PT Telkom Akses dan Pemerintah Daerah dalam Proses Perizinan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kolaboratif antara PT Telkom Akses dan Pemerintah Daerah dalam proses perizinan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Distrik Makbon telah dilaksanakan melalui koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Aktor yang terlibat meliputi PT Telkom Akses sebagai pelaksana pembangunan, Pemerintah Daerah melalui Distrik Makbon sebagai pihak yang memfasilitasi proses administrasi dan rekomendasi, pemerintah kampung sebagai penghubung dengan masyarakat, serta masyarakat sebagai pemilik hak ulayat yang memiliki kepentingan terhadap penggunaan lahan. Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan jaringan telekomunikasi di wilayah penelitian.

Pelaksanaan kolaborasi diawali dengan identifikasi lokasi pembangunan yang dilakukan oleh PT Telkom Akses. Setelah lokasi ditentukan, perusahaan berkoordinasi dengan Pemerintah Distrik Makbon dan pemerintah kampung untuk memperoleh informasi mengenai status lahan serta kondisi

sosial masyarakat. Selanjutnya dilakukan penyampaian rencana pembangunan kepada masyarakat melalui pemerintah kampung sebelum proses administrasi perizinan dilaksanakan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, hukum, dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Koordinasi yang dibangun antara PT Telkom Akses dan Pemerintah Daerah dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembangunan berlangsung. Pemerintah daerah berperan memberikan rekomendasi administrasi, memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah kampung, serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bertentangan dengan ketentuan tata ruang dan kepentingan masyarakat. Sementara itu, PT Telkom Akses bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan jaringan sesuai standar teknis dan ketentuan yang berlaku. Pembagian peran tersebut mencerminkan adanya hubungan kerja sama yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama, yaitu memperluas akses jaringan telekomunikasi bagi masyarakat Distrik Makbon.

Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh adanya dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), dan pemahaman bersama (*shared understanding*). Dalam penelitian ini, dialog dilakukan melalui koordinasi antara PT Telkom Akses, pemerintah daerah, pemerintah kampung, dan masyarakat. Proses komunikasi tersebut bertujuan membangun kesepahaman mengenai manfaat pembangunan jaringan telekomunikasi sekaligus meminimalkan potensi konflik yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah kampung memiliki posisi strategis sebagai mediator antara perusahaan dengan masyarakat. Keterlibatan kepala kampung dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta memfasilitasi komunikasi mengenai penggunaan lahan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan strategi kolaboratif tidak hanya bergantung pada hubungan antara perusahaan dan pemerintah daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan utama.

Temuan ini juga mendukung penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur publik memerlukan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi yang dibangun melalui komunikasi yang terbuka, koordinasi yang berkelanjutan, dan pembagian peran yang jelas mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan serta mengurangi potensi konflik dalam proses implementasi kebijakan. Dengan demikian, strategi kolaboratif yang diterapkan oleh PT Telkom Akses dan Pemerintah Daerah di Distrik Makbon telah menunjukkan praktik tata kelola kolaboratif yang mendukung keberhasilan proses perizinan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perbaikan pada tahap pelaksanaannya.

B. Kendala Strategi Kolaboratif dalam Proses Perizinan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi kolaboratif antara PT Telkom Akses dan Pemerintah Daerah dalam proses perizinan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Distrik Makbon belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Meskipun koordinasi dan komunikasi telah dilakukan oleh para pihak yang terlibat, masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan. Kendala tersebut berasal dari aspek administratif, sosial, maupun kelembagaan sehingga berpengaruh terhadap kelancaran proses perizinan dan pelaksanaan

pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi.

Salah satu kendala utama adalah proses administrasi perizinan yang masih memerlukan waktu relatif lama. Proses perizinan melibatkan beberapa tahapan administrasi serta koordinasi dengan berbagai instansi sehingga penyelesaian dokumen sering mengalami keterlambatan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pembangunan tidak selalu dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Selain itu, adanya perbedaan mekanisme administrasi pada setiap tingkat pemerintahan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas proses perizinan.

Selain kendala administratif, penelitian juga menemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat pembangunan jaringan telekomunikasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pembangunan tiang dan jaringan telekomunikasi hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, sehingga muncul penolakan terhadap pelaksanaan pembangunan di beberapa lokasi. Kurangnya sosialisasi sebelum pelaksanaan pekerjaan menyebabkan masyarakat belum memperoleh informasi yang memadai mengenai manfaat pembangunan infrastruktur telekomunikasi bagi peningkatan akses informasi, pelayanan publik, pendidikan, maupun aktivitas ekonomi masyarakat.

Permasalahan lain yang cukup dominan adalah penggunaan lahan dan hak ulayat. Sebagian besar lokasi pembangunan berada pada wilayah yang masih berada di bawah hak kepemilikan masyarakat adat sehingga proses pembangunan harus memperoleh persetujuan dari pemilik hak ulayat. Dalam beberapa kondisi, perbedaan persepsi mengenai penggunaan lahan mengakibatkan proses pembangunan harus ditunda sampai tercapai kesepakatan antara perusahaan, pemerintah kampung, dan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur di wilayah Distrik Makbon.

Penelitian juga menemukan bahwa pada beberapa kegiatan pembangunan masih terdapat praktik pelaksanaan pekerjaan sebelum seluruh dokumen perizinan diselesaikan secara administratif. Kondisi tersebut terjadi karena adanya kebutuhan percepatan pembangunan jaringan di lapangan. Namun demikian, praktik tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum maupun konflik dengan masyarakat apabila tidak didukung oleh dokumen perizinan yang lengkap. Oleh karena itu, penyempurnaan administrasi perizinan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Apabila dianalisis menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008), berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa proses kolaborasi masih menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan (trust building) dan pemahaman bersama (shared understanding) di antara para pemangku kepentingan. Kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan belum terbentuk secara optimal karena informasi yang diterima masih terbatas, sedangkan koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya mampu mempercepat penyelesaian administrasi perizinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada adanya kerja sama formal, tetapi juga ditentukan oleh kualitas komunikasi, transparansi informasi, dan komitmen seluruh aktor yang terlibat dalam mencapai tujuan bersama.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa hambatan utama dalam implementasi collaborative governance umumnya berasal dari birokrasi yang kompleks, koordinasi lintas lembaga yang belum efektif, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penyelesaian berbagai kendala tersebut memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kualitas komunikasi publik, serta penyederhanaan mekanisme administrasi agar proses pembangunan infrastruktur jaringan

telekomunikasi dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

C. Upaya PT Telkom Akses dan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Strategi Kolaboratif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telkom Akses dan Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas strategi kolaboratif dalam proses perizinan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Distrik Makbon. Upaya tersebut dilakukan sebagai respons terhadap berbagai kendala yang dihadapi selama proses pembangunan, baik yang berkaitan dengan administrasi perizinan, koordinasi antarinstansi, maupun hubungan dengan masyarakat. Langkah-langkah perbaikan diarahkan untuk menciptakan proses pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi antara PT Telkom Akses dengan Pemerintah Daerah melalui komunikasi yang lebih intensif sejak tahap perencanaan pembangunan. Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap lokasi pembangunan telah memenuhi persyaratan administrasi, memperoleh rekomendasi dari pemerintah setempat, serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, proses penyelesaian perizinan dapat dilakukan secara lebih terarah sehingga mampu mengurangi potensi keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Selain koordinasi antarlembaga, peningkatan komunikasi dengan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam strategi kolaboratif. Sebelum pelaksanaan pembangunan, pemerintah kampung bersama PT Telkom Akses melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan lokasi pembangunan jaringan telekomunikasi. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus membangun dukungan terhadap pembangunan infrastruktur. Keterlibatan masyarakat sejak tahap awal diharapkan mampu meminimalkan kesalahpahaman serta mengurangi potensi konflik yang berkaitan dengan penggunaan lahan maupun hak ulayat.

Penelitian juga menunjukkan bahwa penyempurnaan administrasi perizinan merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi. Setiap dokumen perizinan, surat rekomendasi, dan persetujuan masyarakat perlu didokumentasikan secara lengkap sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan pembangunan. Pengarsipan dokumen secara sistematis tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, tetapi juga mempermudah proses pengawasan dan evaluasi apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Dengan demikian, administrasi perizinan tidak lagi dipandang sebagai persyaratan formal semata, melainkan sebagai instrumen untuk menjamin transparansi dan tata kelola pembangunan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah kampung juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi. Kepala kampung berfungsi sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara PT Telkom Akses dengan masyarakat, terutama dalam penyelesaian persoalan penggunaan lahan dan hak ulayat. Keterlibatan pemerintah kampung memberikan kemudahan dalam membangun kepercayaan masyarakat karena informasi mengenai pembangunan disampaikan oleh pihak yang memiliki legitimasi dan kedekatan sosial dengan masyarakat setempat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menegaskan bahwa kolaborasi yang efektif memerlukan komunikasi yang

berkelanjutan, kepercayaan antaraktor, komitmen bersama, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Semakin kuat koordinasi dan komunikasi yang dibangun, semakin besar peluang tercapainya tujuan bersama. Dalam konteks penelitian ini, keberhasilan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis PT Telkom Akses ataupun kewenangan Pemerintah Daerah, tetapi juga oleh sinergi yang terbangun dengan pemerintah kampung dan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur publik sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi yang didasarkan pada keterbukaan informasi, pembagian peran yang jelas, serta koordinasi yang berkelanjutan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, penguatan strategi kolaboratif perlu terus dilakukan melalui penyederhanaan mekanisme perizinan, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi peran pemerintah kampung, serta pelaksanaan sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Distrik Makbon dapat dilaksanakan secara efektif, memiliki kepastian hukum, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi kolaboratif antara PT Telkom Akses dan Pemerintah Daerah dalam proses perizinan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Distrik Makbon Kabupaten Sorong telah dilaksanakan melalui koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran antara PT Telkom Akses, Pemerintah Daerah, pemerintah kampung, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut mendukung kelancaran proses perizinan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi kolaboratif meliputi lamanya proses administrasi perizinan, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat pembangunan jaringan telekomunikasi, serta persoalan penggunaan lahan dan hak ulayat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan apabila tidak diimbangi dengan komunikasi dan koordinasi yang efektif antarpemangku kepentingan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi meliputi penguatan koordinasi antara PT Telkom Akses dan Pemerintah Daerah, peningkatan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penyempurnaan administrasi perizinan, serta optimalisasi peran pemerintah kampung sebagai mediator antara perusahaan dan masyarakat. Penerapan strategi tersebut diharapkan mampu mewujudkan proses perizinan yang lebih efektif, transparan, memiliki kepastian hukum, serta mendukung pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang berkelanjutan di Distrik Makbon

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platform governance: A new approaches to co-production and public value. *Public Administration Review*
- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Bagaskara, R. (2023). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dalam mendukung transformasi digital di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 112–124.
- Bryson et al., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). *The design and implementation of cross-sector*

- collaborations: Propositions from the literature. *Public Administration Review*, 66(S1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Dwiyanto, A. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Ferlita, A. (2024). Kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 45–56.
- Kamaluddin, A., dkk. (2021). Government and Private Collaboration in Coping with Covid-19 in Sorong City. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 8(5), 333–341. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n5.1907>
- Kamaluddin, A., et al. (2025). Digitalization and Development of Local Economic Resources in Administrative Services in Waisai District, Raja Ampat Regency. *Power System Technology*, 49(3), 2532–2541. <https://powertechjournal.com/index.php/journal>
- Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 295–302. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1465>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Muttaqin, M. N., Indah, B., Citrawati, D., Pebiana, A., Ahmad, H., Maulana, H., Rahmayanti, D., Nuryatman, D., & Seran, G. (2020). Service quality and its determinants of population administration service in Bogor Regency. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 54(5), 109–118.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Naufal Muttaqin, M., dkk. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 98–110.
- Nuriyanto. (2016). Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 421–438.
- Perdana, R., dkk. (2025). Peran PT Telkom Akses dalam pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 14(1), 67–79.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2013). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukma, R., & Furqon, M. (2025). Collaborative governance dalam pembangunan infrastruktur daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 21–35.
- Sunani, U. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 3(2), 45–55. <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v3i2.2215>
- Sorensen, E., & Torfing, J. (2016). *Theories of democratic network governance*. London: Palgrave Macmillan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.